



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Pidato Dies Natalis Fisipol UGM ke-70

Merefleksikan Ulang Masyarakat dalam Pusaran Ketidakpastian Sosial

19 September 2025



Disusun oleh:

- Prof. Dr-Phil. Janianton Damanik
- Bahruddin, Ph.D
- Nurhadi, Ph,D
- Milda L. Pinem, Ph.D
- Tauchid Komara Yuda, Ph.D
- Dian Fatmawati, S.Sos., M.A
- Maygsi Aldian, S.Sos., M.A
- Saqib Fardan Ahamada, S.Sos., MDP
- Pinurba Parama Pratiyudha, S.Sos., M.A
- Kaffa Abdallah Kaffaa, S.Sos., M.A
- Galih Prabaningrum, S.Sos., M.A
- Farid Budiono, S.Sos., M.A

MEREFLEKSIKAN ULANG MASYARAKAT DALAM PUSARAN KETIDAKPASTIAN SOSIAL

Pendahuluan

Hadirin yang saya hormati,

Beberapa waktu lalu, seorang rekan kami bercerita tentang pengalamannya menyaksikan aksi massa di depan kantor kepolisian daerah DIY. Ia tidak menekankan pada sebab-sebab politis yang memicu aksi tersebut, melainkan pada ekspresi wajah para peserta aksi. Raut-raut itu memperlihatkan campuran kemarahan, ketakutan, kecemasan, dan kegelisahan. Yang lebih mengejutkan, ia menyadari bahwa ekspresi serupa pernah ia temui jauh sebelum peristiwa itu—di pasar-pasar tradisional, di desa-desa terpencil, hingga di ruang-ruang diskusi masyarakat. Ekspresi itu seakan menjadi semacam potret kolektif dari kegelisahan sosial yang kian nyata dalam kehidupan kita sehari-hari.

Kita bisa menemukan wajah-wajah yang sama di berbagai penjuru negeri. Ada cerita tentang seorang pedagang melinjo di Labuan, Banten, yang setahun penuh tidak dapat menjual dagangannya. Ada pula masyarakat di pelosok Sulawesi Tengah yang setiap tahun hidup dalam ketakutan menghadapi bencana alam yang datang tanpa kepastian. Bahkan di Bantul, para petani dihantui bayang-bayang gagal panen akibat perubahan iklim yang kian ekstrem. Semua kisah ini, meskipun berbeda latar dan lokasi, berbicara dalam bahasa yang sama: bahasa ketidakpastian.

Ketidakpastian bukanlah sekadar perasaan subjektif, melainkan realitas objektif yang kini kita hadapi bersama. Pada tataran global, kesepakatan ilmiah sudah lama menegaskan bahwa kita sedang hidup di era krisis iklim yang memengaruhi seluruh aspek peradaban manusia. Pemanasan global, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya frekuensi bencana ekologis menimbulkan pertanyaan serius: sejauh mana keberlanjutan hidup manusia dapat dipertahankan?¹ Pandemi COVID-19 mempertegas kerentanan ini. Ia bukan hanya krisis kesehatan, tetapi juga membuka tabir rapuhnya sistem ekonomi, sosial, dan politik global sekaligus.²

Tak berhenti di situ, dunia juga dihadapkan pada meningkatnya ketegangan geopolitik: perang di Ukraina, konflik berkepanjangan di Palestina, serta munculnya kembali politik identitas dan populisme di banyak negara. Semua ini tidak hanya menguji tatanan politik global, tetapi juga mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keadilan sosial.³ Di Indonesia, situasi ini tercermin dalam gejolak demokrasi yang akhir-akhir ini kian rapuh: kebijakan kontroversial, polarisasi politik, dan munculnya pernyataan-pernyataan pejabat publik yang justru memperdalam kegelisahan masyarakat.

¹ IPCC. (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report*. Intergovernmental Panel on Climate Change

² UNDP. (2021). *COVID-19 and Human Development: Assessing the Crisis, Envisioning the Recovery*

³ Fukuyama, F. (2018). *Identity: Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition*. London: Profile Books Ltd

Dalam konteks inilah, dunia saat ini sedang memasuki era VUCA—*Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous*. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada masa Perang Dingin untuk menggambarkan situasi dunia yang tidak menentu oleh karena permasalahan stabilitas politik dan ekonomi dengan adanya perang dua kutub besar. Beberapa dekade kemudian, konsep ini digunakan kembali untuk menafsirkan disrupsi teknologi yang mengubah wajah kehidupan sosial-ekonomi secara cepat.⁴ Kini, kesadaran akan VUCA berkembang lebih luas: kita tidak hanya berhadapan dengan disrupsi teknologi, melainkan juga disrupsi ekologi, ekonomi, politik, bahkan sosial. Kita bisa menyebut kondisi hari ini sebagai situasi multi disrupsi—suatu pusaran ketidakpastian yang bergerak dari skala global hingga lokal.

Ketidakpastian itu dapat kita lihat pada tiga level sekaligus. Pada level global, kita menghadapi perubahan iklim, konflik regional, dan gejolak sosial lintas negara. Pada level nasional, kita menyaksikan keresahan publik akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi yang sering kali tidak memberikan kepastian arah. Selanjutnya, pada level lokal, seperti yang telah saya ceritakan di awal, masyarakat merasakan langsung ketidakpastian dalam bentuk kesulitan ekonomi, kerentanan bencana, serta ancaman gagal panen. Semua ini menunjukkan bahwa VUCA bukanlah teori abstrak, melainkan kenyataan yang mewarnai kehidupan kita sehari-hari.

Dengan demikian, refleksi atas kegelisahan masyarakat yang kita temui di jalanan, di pasar, maupun di desa-desa terpencil bukan sekadar potret sesaat, tetapi ia adalah tanda zaman. Zaman saat kita dipanggil untuk mengakui dan menghadapi kenyataan bahwa ketidakpastian bukan lagi pengecualian, melainkan menjadi kondisi normal baru yang membentuk dinamika sosial, ekonomi, dan politik kita.

Perlu kita sadari bersama bahwa masyarakat Indonesia sejatinya bukanlah entitas yang pasif dalam menghadapi ketidakpastian. Sejak lama, komunitas lokal memiliki mekanisme kehidupan yang terbukti efektif untuk bertahan dalam situasi yang serba sulit. Tradisi gotong royong, jaringan solidaritas sosial, serta berbagai praktik ekonomi berbasis komunitas telah berfungsi sebagai bantalan yang memungkinkan masyarakat melewati krisis demi krisis. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi bagian dari budaya, tetapi juga modal sosial yang hidup, yang terus diwariskan lintas generasi.⁵

Namun demikian, tantangan ketidakpastian yang datang dari rantai sistem global sering kali justru menggerus mekanisme yang telah ada. Globalisasi ekonomi, perubahan iklim lintas batas, hingga disrupsi politik global menciptakan tekanan yang tidak jarang berakibat pada melemahnya kohesi sosial di tingkat lokal. Pola ketidakpastian semacam ini sering melahirkan apa yang bisa kita sebut sebagai *korosi inklusi sosial*—yakni kondisi ketika ruang-ruang keterlibatan sosial yang selama ini menjaga masyarakat menjadi terkikis sedikit demi sedikit. Dalam situasi seperti ini, sebagian kelompok masyarakat

⁴ Purwanto, E. A. (2019, Desember 23). *Kebijakan publik yang agile dan inovatif dalam memenangkan persaingan di era VUCA (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous)*. Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁵ Geertz, C. (1962). "The Rotating Credit Association: A 'Middle Rung' in Development." *Economic Development and Cultural Change*, 10(3), 241–263; Bowen, J. R. (1986). "On the Political Construction of Tradition: *Gotong Royong* in Indonesia." *The Journal of Asian Studies* 45 (3): 545–561. <https://doi.org/10.2307/2056530>.

mulai terpinggirkan baik dari akses terhadap sumber daya, kesempatan, maupun pengakuan sosial yang layak.⁶

Kita bisa melihat gejala tersebut dalam beragam bentuk: petani kecil yang kian kehilangan daya tawar terhadap pasar global, komunitas pesisir yang terpinggirkan karena proyek pembangunan berskala besar, hingga masyarakat adat yang ruang hidupnya semakin menyempit akibat eksploitasi sumber daya alam. Semua ini menunjukkan bahwa ketidakpastian yang kita hadapi bukan hanya menciptakan keresahan, tetapi juga berpotensi memperlemah fondasi inklusi sosial yang telah lama dibangun oleh masyarakat kita.

Maka, hadirin sekalian, refleksi kita pada hari ini bukan sekadar untuk mengulangi cerita-cerita kegelisahan yang telah saya sampaikan di awal. Lebih jauh, refleksi ini ingin mengangkat sebuah pertanyaan mendasar: sejauh mana permasalahan ketidakpastian yang kita hadapi saat ini berkontribusi pada terjadinya korosi inklusi sosial? Jika memang demikian adanya, bagaimana kemudian dunia akademik dapat merumuskan agenda ke depan yang tidak hanya berhenti pada analisis, tetapi juga berfokus pada pengakuan terhadap komunitas serta membangun kembali praktik gotong royong sebagai strategi kolektif menghadapi ketidakpastian?

Uraian Permasalahan

Dalam lanskap kontemporer, dunia—termasuk Indonesia—dihadapkan pada konstelasi krisis yang saling berkelindan dan memperkuat satu sama lain. Krisis iklim yang kian mendesak, ketidakstabilan ekonomi yang memunculkan kelompok *kelas menengah tanggung*, risiko politik yang sarat ketidakpastian dalam bingkai *risk society* dan *VUCA politics*, disrupsi digital yang melahirkan krisis epistemik, hingga korosi inklusi sosial dan kebijakan populis yang menggerus meritokrasi serta kepercayaan publik, semuanya membentuk konfigurasi kompleks yang mengancam kohesi sosial dan daya saing bangsa. Situasi ini bukanlah fenomena terpisah, melainkan gejala sistemis dari dunia yang sedang bertransisi, ketika peluang dan risiko hadir bersamaan, menuntut perguruan tinggi dan komunitas intelektual untuk menelaah akar masalah secara kritis sekaligus menawarkan horizon solusi yang visioner.

Masalah 1: Permasalahan Iklim (risiko ekologis)

Dalam perspektif global, perkembangan teknologi yang mendorong arus globalisasi memang memberikan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan manusia, tetapi pada saat yang sama menimbulkan konsekuensi serius berupa krisis ekologi. Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC) dalam laporannya menyatakan bahwa suhu rata-rata global diperkirakan akan mencapai atau bahkan melampaui 1,5 °C di atas tingkat pra-industri dalam kurun waktu dua dekade mendatang. Kondisi ini dipandang sebagai ancaman yang lebih

⁶ Silver, H. (2015). "The Contexts of Social Inclusion." *UNDP Human Development Report Office Paper*; Mayer, B., et al (2015). Compensation and Community Corrosion: Perceived Inequalities, Social Comparisons, and Competition Following the Deepwater Horizon Oil Spill. *Sociological Forum (Randolph, N.J.)*, 30(2), 369–390.

mengkhawatirkan dibandingkan krisis ekonomi, mengingat dampaknya yang bersifat multidimensional dan dirasakan hampir di seluruh negara.

Di kawasan Eropa, misalnya, krisis ekologi termanifestasi dalam bentuk cuaca ekstrem yang memicu gelombang panas, kebakaran hutan, dan banjir; kekeringan berkepanjangan yang berimplikasi pada krisis air; serta kenaikan muka laut dan pencairan es akibat pemanasan global. Di Tiongkok, gelombang industrialisasi dan urbanisasi masif menimbulkan persoalan ekologis seperti polusi udara dan air, degradasi tanah, hingga hilangnya keanekaragaman hayati. Fenomena serupa juga dialami oleh negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, dan India, yang menghadapi berbagai bencana alam dan tekanan ekologis sebagai akibat langsung dari perubahan iklim.

Krisis lingkungan merupakan salah satu isu strategis yang dihadapi Indonesia pada dekade terakhir. Isu ini secara konsisten menempati posisi sentral dalam diskursus publik maupun pemberitaan media. Kerusakan lingkungan yang terjadi telah menimbulkan konsekuensi serius bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan ekosistem. Pembangunan infrastruktur yang masif dengan pemanfaatan material tidak ramah lingkungan menjadi salah satu faktor signifikan yang berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca sehingga mempercepat dinamika perubahan iklim secara ekstrem. Kondisi ini diperburuk oleh tingginya laju deforestasi dan degradasi lahan. Meskipun data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 menunjukkan tren penurunan angka deforestasi tahunan dibandingkan periode sebelumnya, praktik alih fungsi lahan untuk kepentingan perkebunan, pertambangan, serta pembangunan infrastruktur masih menyumbang emisi gas rumah kaca dalam skala yang signifikan. Di sisi lain, pencemaran udara yang bersumber dari penggunaan energi fosil di sektor transportasi dan industri semakin menambah kompleksitas persoalan lingkungan nasional.

Dalam konteks kebencanaan, lebih dari 3.400 peristiwa bencana alam tercatat di Indonesia sepanjang tahun 2024, termasuk 1.420 kejadian banjir. Kasus banjir yang melanda Bali baru-baru ini tidak hanya menjadi peringatan atas eskalasi perubahan iklim, tetapi juga menegaskan bahwa Indonesia tengah menghadapi krisis iklim yang nyata. Faktor alam memang berperan sebagai pemicu, namun kerentanan tersebut diperparah oleh tekanan antropogenik. Kepadatan penduduk di Bali yang kian meningkat tidak diimbangi dengan perbaikan tata ruang yang memadai. Alih fungsi lahan secara masif, berkurangnya ruang terbuka hijau, ketidakefektifan sistem drainase, serta lemahnya pengelolaan daerah resapan air menjadi determinan utama yang memperbesar risiko banjir di wilayah tersebut. Hal ini menjadi bukti bahwa pembangunan di Indonesia masih terperangkap pada orientasi jangka pendek dan nyaris tidak memikirkan generasi yang akan datang.

Masalah 2: Permasalahan Ketidakstabilan Ekonomi

Di bidang ekonomi, sepanjang tahun 2025, Indonesia banyak dikejutkan dengan berita Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dan kesulitan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan. PHK banyak melanda industri padat karya seperti tekstil, garmen, dan juga elektronik. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melaporkan terdapat sekitar 40.000 pekerja terdampak PHK selama Januari dan Februari 2025, sedangkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sampai dengan Mei 2025 mencatat sekitar 26.455 pekerja

terkena PHK massal. Realita di lapangan di sebuah Job Fair di Cikarang Bekasi terdapat 25.000 pencari kerja memperebutkan 2.000 lowongan pekerjaan (Tempo, 2025). Sehingga menyebabkan banyak lulusan sarjana terpaksa mengisi lowongan kerja di sektor informal, seperti asisten rumah tangga, *babysitter* dan ojek *online*.

Meningkatnya kelompok rentan Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada 2024, terdapat sekitar 9,5 juta orang terlempar dari kategori kelas menengah. Pada saat yang sama, BPS melaporkan tingkat kemiskinan menurun dari 8,57% menjadi 8,47% pada Maret 2025. Berbeda dari BPS, Bank Dunia data mencatat sekitar 171,8 juta atau sekitar 60.3% dari total penduduk Indonesia orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan besarnya populasi masyarakat Indonesia yang masuk dalam kategori “kelas menengah tanggung” atau yang dikenal sebagai *aspiring middle-class*, merupakan kelompok masyarakat rentan untuk naik dan turun kelas dalam kelompok miskin. Padahal, kelas menengah memiliki potensi besar dalam mendorong perekonomian Indonesia. Walaupun hanya mencakup sekitar seperlima penduduk, kelompok ini menyumbang setengah dari total konsumsi rumah tangga nasional, menjadikannya motor utama pertumbuhan. Perluasan kelas menengah dipandang penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesejahteraan masyarakat.

Terlepas dari berbagai permasalahan ketenagakerjaan dan meningkatnya kelompok rentan Indonesia, pemerintah mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat pada triwulan II 2025, sekitar 5.12%. Kondisi ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh iklim ekonomi Internasional, seperti krisis pasca pandemi, perang tarif antara China dan Amerika Serikat turut membatasi laju ekonomi dan daya saing internasional.

Berbagai tantangan yang hadir di Indonesia terjadi di tengah bonus demografi, ketika Indonesia mengalami lonjakan populasi usia kerja yang diperkirakan berlangsung hingga 2040. Padahal, negara dengan persentase penduduk usia produktif yang tinggi memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Dalam satu dekade terakhir, Indonesia mengalami kekurangan dalam penciptaan lapangan kerja formal dibandingkan dengan angkatan kerja. Realitas ini menunjukkan perlunya reformasi secara terstruktur, memperluas kesempatan kerja yang berkualitas, memperkuat daya saing masyarakat serta perlindungan untuk kelompok rentan untuk mencapai cita-cita Indonesia emas.

Masalah 3: Permasalahan/Risiko Politik

Dalam lanskap global maupun nasional, risiko politik semakin menjadi sumber ketidakpastian (*political uncertainty*) yang sukar diprediksi. Rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok hingga ketegangan di Laut Cina Selatan berimplikasi langsung pada stabilitas politik domestik di negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Dalam kondisi ini, negara-negara berkembang kerap berada pada posisi rentan karena arah kebijakan luar negeri maupun ekonomi domestik harus disesuaikan dengan dinamika global yang penuh volatilitas. Situasi ini menegaskan bahwa politik dewasa ini

tidak lagi hanya soal kontestasi elektoral, tetapi juga arena produksi risiko sosial-ekonomi, sebagaimana digambarkan oleh Ulrich Beck dalam kerangka *risk society*⁷.

Di tingkat nasional, demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius berupa regresi demokrasi, menguatnya populisme, dan pola kepemimpinan bergaya *strongman*^{8,9}. Fenomena ini tercermin dalam naiknya figur politik dengan citra yang memanfaatkan media sosial, serta pembatasan ruang kritik publik dan independensi institusi pengawas¹⁰. V-Dem Institute menegaskan bahwa kecenderungan autokrasi (*autocratization*) tengah meningkat, dengan kebebasan berekspresi menurun di 35 negara dalam satu dekade terakhir^{11,12}. Vedi Hadiz juga memperingatkan bahwa demokrasi dapat “bunuh diri” ketika pemilu justru menghadirkan pemimpin yang melemahkan demokrasi dari dalam, dengan memanfaatkan institusi formal untuk melanggengkan kekuasaan dan mempersempit ruang kritik publik¹³. Dalam kondisi demikian, banyak lembaga politik maupun birokrasi terjebak dalam fenomena *institutional herding*, yakni mengikuti arus dominan elite ketimbang menjaga independensi sehingga memperkuat siklus ketidakpastian politik¹⁴.

Fenomena ini menemukan gaungnya dalam gelombang protes di Indonesia maupun Nepal, ketika generasi muda mengartikulasikan ketidakpuasan mereka terhadap korupsi, sensor, dan otoritarianisme melalui simbol budaya populer, seperti *anime pirate flag*¹⁵. Simbol ini menandai perlawanan kreatif terhadap apa yang dipersepsikan sebagai kontrak sosial yang rapuh dan masa depan yang penuh ambiguitas. Dalam kerangka VUCA (*volatility, uncertainty, complexity, ambiguity*), aksi-aksi tersebut menjadi indikator struktural dari krisis legitimasi negara, sekaligus cerminan bahwa politik kontemporer tidak lagi dapat diprediksi dengan logika linear.

⁷ Beck, U. (1992). *Risk society: Towards a new modernity*. Sage.

⁸ Rachman, G. (2022). *The age of the strongman: How the cult of the leader threatens democracy around the world*. Random House.

⁹ *Strongman leader* merujuk pada figur politik yang memusatkan kekuasaan pada kepribadiannya, membangun *cult of personality*, serta kerap melemahkan mekanisme *checks and balances* demokrasi dengan mengandalkan populisme dan nasionalisme untuk memperoleh legitimasi. Gideon Rachman menyebut tren ini sebagai fenomena global sejak awal 2000-an, dengan contoh figur seperti Putin, Trump, Xi, Modi, dan Bolsonaro.

¹⁰ Ahmada, S. F. (2024, April 24). [Call for commentary] *Control of the people or people under control? Strongman leadership era and social media propaganda*. Digital Society. <https://digitalsociety.id/2024/04/24/call-for-commentary-control-of-the-people-or-people-under-control-strongman-leadership-era-and-social-media-propaganda/17195/>

¹¹ V-Dem Institute. (2023). *Democracy report 2023: Defiance in the face of autocratization*. University of Gothenburg.

¹² *Autocratization* adalah proses pergeseran dari demokrasi menuju autokrasi, ditandai dengan penurunan signifikan dalam kualitas pemilu, kebebasan sipil, dan independensi institusi. V-Dem mengukur autokratisasi sebagai penurunan substansial skor Liberal Democracy Index yang dapat mengubah demokrasi elektoral menjadi *electoral autocracy*, yakni rezim yang masih mengadakan pemilu tetapi tidak lagi menjamin kebebasan berekspresi maupun kompetisi yang adil

¹³ Hadiz, V. R. (2024, January 25). Demokrasi bisa bunuh diri: Pelajaran dari pemilu dunia. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/demokrasi-bisa-bunuh-diri-pelajaran-dari-pemilu-dunia>

¹⁴ vrilidis, K., Kallinterakis, V., & Montone, M. (2024). Political uncertainty and institutional herding. *Journal of Corporate Finance*, 88, 102627.

¹⁵ Asianews Network. (2024). From Indonesia to Nepal, anime pirate flag has become a symbol of Asian Gen Z's discontent. *Asia News Network*. <https://asianews.network/from-indonesia-to-nepal-anime-pirate-flag-has-become-a-symbol-of-asian-gen-zs-discontent/>

Masalah 4: Permasalahan/Risiko Digital

Saat ini, kita memasuki babak sejarah ketika setiap gawai menjelma ruang redaksi pribadi. Skala keterhubungan manusia belum pernah sebesar hari ini. Secara global, pengguna media sosial mencapai sekitar 5,41 miliar atau 65,7% populasi dunia¹⁶. Di Indonesia, penetrasi internet pada tahun 2025 menembus 80,66% yang artinya sekitar 229 juta warga telah terhubung¹⁷. Namun, derasnya arus itu juga membawa paradoks, yaitu kelebihan informasi (*information overload*) terjadi bersamaan dengan ketimpangan kecakapan digital, terutama di kelompok rentan dan wilayah 3T. Indeks Literasi Digital Nasional pada tahun 2022 masih pada angka 3,54¹⁸, menandakan pekerjaan rumah pada kemampuan memilah, menilai, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Ini bukan sekadar isu teknologi, ini adalah tantangan dalam pembangunan sosial karena akses terhadap informasi yang benar dan kemampuan menggunakannya menjadi kunci untuk menentukan kualitas partisipasi masyarakat dalam keputusan yang menyangkut hidup bersama.

Masalah utama kita bukan hanya derasnya arus, melainkan mutu dan peredarannya. Informasi menyesatkan (*misinformation*) dan disinformasi (*disinformation*) terbukti menyebar lebih cepat, lebih jauh, dan lebih dalam dibanding kebenaran. Sebuah studi yang dilakukan oleh Soroush Vosoughi, Deb Roy, dan Sinan Aral¹⁹ menunjukkan bahwa kabar palsu 70% lebih mungkin untuk dibagikan dibanding kabar benar dan pendorong utamanya adalah perilaku manusia, bukan sekadar *bot*. Di tingkat nasional, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) mencatat 2.330 hoaks sepanjang tahun 2023 yang terdiri dari 1.292 di antaranya bertema politik dan 645 di antaranya terkait dengan Pemilu 2024²⁰. Kombinasi arsitektur algoritma yang mengejar keterlibatan pengguna (*engagement*) dan banjir konten sensasional (*clickbait*) menyuburkan ruang gema (*echo chambers*) dan gelembung informasi (*filter bubbles*), membuat wacana publik gampang terseret sensasi dan memperlemah modal sosial yang kita butuhkan untuk bermusyawarah.

Akibatnya, kita menghadapi krisis pengetahuan (*epistemic crisis*) saat batas antara fakta, opini, dan propaganda kian kabur. Pada aras global, situasi ini mendegradasi kepercayaan dan mengganggu orientasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Pada aras lokal—di kampung, desa, dan kota—konsekuensinya menjangkiti arena deliberasi: pelayanan sosial terdisrupsi oleh isu viral, komunikasi peringatan bencana dan iklim teredam oleh *noise* informasi, dan program kesejahteraan direduksi menjadi kontestasi wacana alih-alih agenda pemecahan masalah. Fragmentasi ruang percakapan memecah jejaring kepercayaan, menurunkan kualitas partisipasi warga, dan pada

¹⁶ DataReportal, "Digital 2025 July Global Statshot: 5.41B social media users (65.7%)," 23 Juli 2025.

¹⁷ ANTARA, "APJII catat penetrasi internet Indonesia capai 80,66% (\pm 229 juta) pada 2025," 6 Agustus 2025.

¹⁸ Kominfo (InfoPublik), "Indeks Literasi Digital 2022 naik jadi 3,54," 1 Februari 2023.

¹⁹ S. Vosoughi, D. Roy, S. Aral, "The spread of true and false news online," *Science* (2018)

²⁰ MAFINDO, "Siaran Pers: 2.330 hoaks 2023; 1.292 hoaks politik; 645 terkait Pemilu 2024," 2 Februari 2024.

gilirannya mengikis daya kita sebagai komunitas untuk menyepakati kebenaran bersama. Inilah ini masalahnya, risiko digital bukan semata perkara *software dan hardware*, melainkan proses tata kelola pengetahuan dan kohesi sosial—penentu apakah dari ketidakpastian kita sanggup menata kesempatan dan benar-benar membentuk masa depan bersama (*shaping a shared future*)?.

Masalah 5: Korosi Inklusi Sosial

Dalam konteks sosial kontemporer yang dibalut oleh krisis multidimensional, istilah korosi inklusi sosial merujuk pada fenomena terkikisnya akses, partisipasi, dan pengakuan terhadap kelompok-kelompok sosial tertentu dalam sistem sosial-ekonomi yang lebih luas^{21,22,23}. Fenomena ini terjadi secara perlahan, tetapi sistematis, dan merupakan dampak dari tekanan eksternal seperti globalisasi neoliberal, krisis iklim, konflik geopolitik, serta ketidakstabilan politik nasional. Inklusi sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Silver dan Sen, bukan hanya mencakup partisipasi ekonomi, melainkan juga keterlibatan dalam dimensi kultural, politik, dan sosial secara bermakna^{24,25} etika inklusi ini terkikis, maka kohesi sosial dan kapasitas kolektif masyarakat untuk menghadapi krisis pun ikut melemah.

Pada aras global, korosi inklusi sosial menjadi semakin nyata melalui peningkatan ketimpangan ekonomi dan sosial yang drastis. Sebagaimana laporan Oxfam pada tahun 2023, bahwa selama dekade terakhir, 1% populasi terkaya di dunia mengakumulasi hampir dua kali lipat kekayaan dibandingkan sisa 99% lainnya²⁶. Tentu ketimpangan ini tidak hanya memperburuk jurang antara si kaya dan si miskin, tetapi juga mempersempit ruang-ruang partisipasi masyarakat akar rumput dalam proses pengambilan keputusan global. Hal ini semakin diperparah lagi oleh perubahan iklim, yang meskipun disebabkan secara dominan oleh negara-negara industri, justru berdampak paling merugikan terhadap negara-negara berkembang dan masyarakat adat yang sangat tergantung pada ekosistem lokal untuk bertahan hidup²⁷. Tidak hanya itu, mekanisme ekonomi global yang dominan didorong oleh liberalisasi pasar dan automasi digital juga menyebabkan dislokasi kerja dan hilangnya struktur ekonomi berbasis komunitas di berbagai belahan dunia. Di Eropa dan Amerika Latin, misalnya, kebijakan penghematan dan deregulasi

²¹ Silver, H. (2007). The process of social exclusion: The dynamics of an evolving concept. Chronic Poverty Research Centre. https://www.files.ethz.ch/isn/128271/CP_2006_Silver.pdf

²² Brik, A. B., & Brown, C. T. (2024). Global trends in social inclusion and social inclusion policy: A systematic review and research agenda. *Social Policy and Society*, 1–24. <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/431D60C6173072E27064E3051EE2D8F5/S147474642400054Xa.pdf>

²³ Thirukkani, V. (2024). Social exclusion: A framework for conceptualizing and identifying excluded groups. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 29(9), 59–63. <https://iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.29-Issue9/Ser-5/I2909055963.pdf>

²⁴ Silver, H. (1994). Social exclusion and social solidarity: Three paradigms. *International Labour Review*, 133(5–6), 531–578. [https://webapps.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09602/09602\(1994-133-5-6\)531-578.pdf](https://webapps.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09602/09602(1994-133-5-6)531-578.pdf)

²⁵ Sen, A. (2000). Social exclusion: Concept, application, and scrutiny. Asian Development Bank. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29778/social-exclusion.pdf>

²⁶ Oxfam. (2023). Richest 1% bag nearly twice as much wealth as the rest of the 99%. <https://www.oxfam.org.tw/en/news-and-publication/davos-2023>

²⁷ IPCC. (2023). Climate change 2023: Synthesis report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (AR6). https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_LongerReport.pdf

telah mengakibatkan eksklusi sosial bagi kelompok muda, minoritas, dan migran, sebagaimana dikaji oleh Standing dalam konsep *the precariat*—kelas pekerja yang hidup dalam ketidakpastian, tanpa perlindungan sosial yang memadai²⁸

Lebih lanjut, situasi di Indonesia juga menunjukkan pola yang serupa. Meskipun secara formal Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, tetapi inklusi sosial tidak serta-merta terwujud secara substantif. Proses pembangunan sering kali masih bersifat eksklusif dan *top-down*, yang mengabaikan kebutuhan serta aspirasi kelompok marginal seperti masyarakat adat, nelayan dan petani kecil, serta buruh informal. Hal ini terlihat, misalnya, dalam kebijakan pembangunan infrastruktur yang mengabaikan prinsip-prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) dalam konteks pengakuan hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka^{29,30}. Selain itu, polarisasi politik yang memburuk sejak Pemilihan Presiden 2014, 2019, dan 2024 telah menimbulkan segregasi sosial yang memperkuat politik identitas, memicu ujaran kebencian, dan menghambat terciptanya dialog antar-kelompok. Ketika ruang-ruang deliberasi demokratis justru menjadi ajang eksklusi, maka inklusi sosial mengalami stagnasi, atau bahkan degradasi. Dalam istilah Habermas, kita tengah menyaksikan kolonisasi ruang publik oleh logika kekuasaan yang menggerus etika komunikasi dan partisipasi rasional³¹

Di tingkat lokal, fenomena korosi inklusi sosial tampak paling kasat mata. Komunitas-komunitas yang selama ini mengandalkan modal sosial, seperti gotong royong, arisan kampung, atau koperasi rakyat mulai kehilangan daya hidupnya karena penetrasi nilai-nilai individualisme dan kompetisi pasar. Misalnya, petani di Bantul, Majalengka, Indramayu, dan banyak daerah lainnya mengalami ketidakpastian produksi akibat perubahan iklim. Dalam situasi seperti ini, kelembagaan lokal seperti kelompok tani atau lembaga adat pertanian seharusnya menjadi sumber kekuatan kolektif. Namun realitasnya, dukungan negara terhadap lembaga-lembaga ini sangat terbatas dan sering kali digantikan oleh intervensi pasar berupa kredit komersial atau bantuan bersyarat yang tidak memperkuat daya tawar petani secara struktural. Ini adalah bentuk lain dari *disembedding*, istilah yang dipopulerkan oleh Polanyi, untuk menjelaskan proses pemisahan aktivitas ekonomi dari jalinan sosialnya³²

Masalah 6: Kebijakan Dalam Bayang Populisme

Di tengah guncangan global dan ketidakpastian kehidupan yang semakin mengakar—dari krisis ekonomi, perubahan iklim, hingga disrupsi digital—masyarakat kerap mencari figur atau janji-janji politik yang memberikan solusi cepat dan dramatis. Dalam ruang kosong kepercayaan terhadap institusi demokrasi dan kegagalan elite politik dalam

²⁸ Standing, G. (2014). *The precariat: The new dangerous class*. Bloomsbury Academic. <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/58691/9781849664547.pdf>

²⁹ AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). (2020). Catatan akhir tahun 2020. https://www.aman.or.id/wpcontent/uploads/2021/01/CATATAN-AKHIR-TAHUN-2020_AMAN.pdf

³⁰ AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). (2024). Catatan akhir tahun 2024. <https://aman.or.id/filemanager/files/CATAHU%202024%20-%20final.pdf>

³¹ Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action*. Beacon Press. <https://archive.org/details/theoryofcommunic01habe>

³² Polanyi, K. (1944). *The great transformation: The political and economic origins of our time*. Beacon Press. <https://economicsociology.org/wp-content/uploads/2014/12/the-great-transformation-pdf-free.pdf>

merespons kompleksitas sosial, munculah ruang bagi kebijakan populis yang mengandalkan narasi emosional dan simplifikasi masalah. Kebijakan semacam ini, meski populer di masyarakat awam, acap kali tidak substantif karena mengabaikan analisis berbasis bukti, mengesampingkan kepakaran, serta menawarkan intervensi jangka pendek yang lebih menonjolkan pencitraan ketimbang transformasi struktural³³. Fenomena ini mencerminkan *cultural backlash* dan krisis legitimasi demokrasi, sebagaimana diidentifikasi oleh Inglehart dan Norris, saat kelompok yang merasa tertinggal secara ekonomi dan budaya memberontak melalui dukungan terhadap pemimpin otoriter yang karismatik³⁴. Di Indonesia, kecenderungan ini terlihat dalam kebijakan-kebijakan yang mengedepankan pendekatan militeristis terhadap permasalahan sosial remaja atau pengaitan bantuan sosial dengan kontrol demografi, yang lebih menonjolkan logika politik simbolik ketimbang keadilan sosial substantif^{35,36}. Dalam konteks demikian, populisme bukan sekadar ideologi, melainkan patologi demokrasi yang tumbuh subur di tanah ketidakpastian (*uncertainty*) dan kekecewaan kolektif.

Minimnya penerapan sistem meritokrasi dalam birokrasi dan pengambilan kebijakan kian memperparah krisis legitimasi pemerintahan di tengah ketidakpastian. Dalam banyak kasus, pengangkatan pejabat publik dan pengarah kebijakan strategis lebih didasarkan pada kedekatan politik, loyalitas pribadi, atau pertimbangan elektoral, ketimbang kompetensi, integritas, dan rekam jejak profesional. Fenomena ini tidak hanya mengikis kapasitas negara dalam merespons persoalan kompleks, tetapi juga memperdalam *democratic backsliding*—penurunan kualitas demokrasi yang secara perlahan menggerus prinsip *good governance*. Seperti terlihat dalam beberapa rezim populis, otokratisasi sering kali diawali dengan politisasi birokrasi, yaitu ketika institusi independen dilemahkan dan digantikan oleh aparatur yang lebih patuh daripada profesional^{37,38}. Di Indonesia, gejala ini makin nyata dalam bentuk penempatan tokoh partai di lembaga teknis, intervensi kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok oposisi, serta minimnya ruang bagi kepakaran otonom dalam proses perumusan kebijakan^{39,40}. Laporan Global State of Democracy 2023 oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance mencatat bahwa degradasi meritokrasi merupakan salah satu indikator utama dari "penurunan kualitas demokrasi substantif", terutama ketika seleksi pejabat publik semakin tidak transparan dan rentan terhadap intervensi

³³ Nichols, T. (2017). *The death of expertise: The campaign against established knowledge and why it matters*. Oxford University Press.

³⁴ Inglehart, R. F., & Norris, P. (2016). *Trump, Brexit, and the rise of populism: Economic have-nots and cultural backlash* (HKS Working Paper No. RWP16-026). Harvard Kennedy School.

³⁵ Dede, A. F. (2025, 8 Mei). Kebijakan populis dan matinya kepakaran. Kompas. <https://regional.kompas.com/read/2025/05/08/14163451/kebijakan-populis-dan-matnya-kepakaran>

³⁶ LiP, I. (2021). Otokratisasi dan populisme otoriter dalam rezim demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11(2), 263–300. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/download/13868/6768>

³⁷ Ufen, A. (2023). Patronage and populism: The politicization of bureaucracy in Southeast Asia. In *Routledge handbook of authoritarianism in Southeast Asia* (pp. 112–128). Routledge.

³⁸ Mietzner, M. (2022). Oligarchic populism: Military reform and democratic backsliding in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 54(3), 401–418. <https://doi.org/10.1080/14672715.2022.2051450>

³⁹ Margiansyah, D. (2021). Politisasi birokrasi dan krisis legitimasi negara di Indonesia pasca-reformasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 45–62.

⁴⁰ Bappenas. (2023). Laporan tahunan evaluasi kinerja pemerintah: Reformasi birokrasi dan tata kelola publik 2023. Kementerian PPN/Bappenas.

eksekutif⁴¹. Ketika meritokrasi digantikan oleh logika patronasi, maka kebijakan yang dihasilkan bukan lagi berorientasi pada keadilan dan efisiensi, melainkan pada pemeliharaan kekuasaan. Dalam konteks semacam ini, reformasi birokrasi tidak cukup hanya menyentuh aspek administratif, tetapi harus menasar pada rekonstruksi etos pelayanan publik yang berbasis pada kompetensi dan akuntabilitas⁴².

Salah satu konsekuensi paling kritis dari kebijakan yang tidak substantif dan minim meritokrasi adalah tumbuhnya ketidakpercayaan sipil terhadap negara dan institusi pemerintah—suatu kondisi yang dikenal sebagai *civil distrust*. Ketika masyarakat menyaksikan kebijakan publik diarahkan oleh logika politik jangka pendek, intervensi *personalistik*, serta pengabaian terhadap data dan kepakaran, maka kepercayaan terhadap legitimasi keputusan negara mulai runtuh⁴³. Fenomena ini diperparah oleh miopia kebijakan atau penglihatan sempit dalam perencanaan kebijakan, ketika fokus terkonsentrasi pada dampak jangka pendek dan pencapaian simbolis, tanpa perencanaan strategis yang berkelanjutan. Kebijakan seperti proyek infrastruktur yang tergesa-gesa, kampanye penanggulangan kemiskinan yang tidak terukur, atau pembubaran lembaga independen karena alasan politik, sering kali menghasilkan efek jangka panjang yang merugikan, seperti utang negara membengkak, penurunan kualitas layanan publik, dan pelemahan *checks and balances*. OECD menemukan bahwa negara-negara dengan tingkat *policy myopia* yang tinggi cenderung memiliki indeks kepercayaan publik yang rendah—di bawah 30%—dan lebih rentan terhadap gelombang protes sosial⁴⁴. Di Indonesia, Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa hanya 38% responden menyatakan percaya terhadap kebijakan pemerintah pusat, dengan alasan utama adalah ketidakkonsistenan dan inkonsistensi kebijakan antarwaktu⁴⁵. Hal ini mencerminkan *feedback loop* negatif: kebijakan jangka pendek → hilangnya kepercayaan → tekanan untuk solusi instan → lebih banyak kebijakan populis jangka pendek. Tanpa intervensi berupa institusionalisasi proses kebijakan yang partisipatif dan *evidence-based*, siklus ini akan terus berulang, menggerus stabilitas demokrasi dan kohesi sosial.

Agenda Setting

Hadirin yang saya muliakan,

Setelah kita menelaah berbagai tantangan besar yang datang silih berganti—mulai dari krisis iklim, ketidakstabilan politik, hingga disrupsi teknologi—kita menyadari bahwa dunia akademik tidak bisa lagi berjalan dengan pola lama. Universitas dan fakultas bukan semata tempat memproduksi teori, melainkan juga arena untuk merumuskan

⁴¹ IDEA. (2023). Global state of democracy 2023: Mengkaji ketahanan demokrasi. International Institute for Democracy and Electoral Assistance. https://www.idea.int/sites/default/files/publications/global-state-of-democracy-mengkaji-ketahanan-demokrasi-overview_0.pdf

⁴² OECD. (2022). Public governance review of Indonesia: Strengthening public sector integrity and accountability. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/20c58d6b-en>

⁴³ Winters, J. A., & Weitz-Shapiro, R. (2023). What drives public trust in government? Evidence from 34 democracies. *Comparative Political Studies*, 56(4), 521–556. <https://doi.org/10.1177/00104140221125678>

⁴⁴ OECD. (2023). Policy coherence and long-termism: Overcoming policy myopia in public governance. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/1a1b5f8d-en>

⁴⁵ Indikator Politik Indonesia. (2024). Survei kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah 2024: Analisis persepsi dan determinan kepercayaan. Jakarta: Indikator Politik Indonesia.

agenda-agenda baru yang relevan bagi masyarakat. Agenda ini tidak berdiri di ruang hampa, melainkan tumbuh dari kenyataan sehari-hari yang dihadapi oleh komunitas kita: bagaimana mereka bertahan, menafsirkan, dan membangun makna hidup di tengah ketidakpastian.

Karena itu, Dies Natalis ini tidak hanya layak kita isi dengan nostalgia sejarah, melainkan juga dengan refleksi ke depan: agenda apa yang perlu kita prioritaskan agar Fisipol tetap menjadi mercusuar bagi perubahan sosial. Saya ingin menekankan beberapa agenda akademik yang akan semakin menentukan arah perjalanan kita.

Agenda 1: Pengakuan Epistemologi Masyarakat (*Recognizing*)

Di tengah arus deras ketidakpastian global yang tadi telah kita bicarakan, terdapat beberapa agenda akademik yang semakin mendesak untuk diangkat ke permukaan. **Pertama** ialah soal pengakuan epistemologi masyarakat. Agenda ini bukan sekadar diskursus akademis yang abstrak, melainkan berkaitan langsung dengan cara masyarakat mempertahankan ruang hidupnya, mengelola ekologi, dan membangun makna sosial dalam kondisi serba tidak pasti.

Epistemologi, sebagaimana kita ketahui, adalah cabang filsafat yang membahas hakikat pengetahuan—apa itu pengetahuan? Bagaimana manusia memperolehnya? Dan apa yang membedakan pengetahuan dari sekadar opini? Sejak Plato hingga Kant, epistemologi berkembang sebagai refleksi filosofis atas dasar-dasar pengetahuan. Namun, ketika kerangka epistemologi ini dibawa ke dalam praktik sosial, sering kali kita menjumpai kelemahan mendasar. Dalam konteks Indonesia, kelemahan tersebut tampak jelas— pengetahuan masyarakat sering kali dipandang inferior, tidak ilmiah, bahkan tidak sah, hanya karena tidak memenuhi standar akademik formal⁴⁶.

Padahal, jika kita menengok ke akar kehidupan masyarakat kita, kita menemukan begitu banyak bentuk pengetahuan yang tidak kalah penting. Petani memahami siklus musim melalui tanda-tanda alam; masyarakat adat menjaga hutan dengan aturan adat yang sarat dengan kosmologi; nelayan membaca arah angin dan bintang untuk menentukan jalur tangkap ikan. Semua itu adalah bentuk pengetahuan yang lahir dari pengalaman kolektif, dari refleksi atas relasi ekologis, dan dari kosmologi yang terinternalisasi dalam budaya⁴⁷. Sayangnya, dalam tata epistemik modern, pengetahuan semacam ini kerap tersisih.

Hierarki pengetahuan yang menempatkan pengetahuan modern Barat di atas pengetahuan lokal telah menciptakan apa yang disebut sebagai inferioritas epistemik⁴⁸. Masyarakat ditempatkan sebagai objek penelitian atau penerima kebijakan, bukan sebagai subjek yang berdaulat atas pengetahuan mereka sendiri. Konsekuensinya, kita melihat adanya jarak antara kebijakan pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat. Misalnya, proyek pertanian modern sering mengabaikan praktik tradisional agroekologi yang justru lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Hal lain misal program kesehatan

⁴⁶ Smith, L. T. (2012). *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*. Zed Books.

⁴⁷ Geertz, C. (1962). "The Rotating Credit Association: A 'Middle Rung' in Development." *Economic Development and Cultural Change*, 10(3), 241–263

⁴⁸ Escobar, A. (1995). *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton University Press.

yang mengesampingkan kearifan lokal dalam praktik pengobatan tradisional, padahal masyarakat telah lama membuktikan efektivitasnya.

Kondisi ini menandakan adanya korosi epistemologi. Pengetahuan masyarakat yang dulu menopang kohesi sosial dan keberlanjutan ekologis perlahan-lahan terkikis karena tidak mendapatkan pengakuan yang semestinya. Bila dibiarkan, korosi ini dapat memperdalam krisis inklusi sosial. Masyarakat bukan hanya kehilangan sumber daya, tetapi juga kehilangan hak epistemiknya—hak untuk mendefinisikan dan mengelola pengetahuan yang mereka miliki.

Maka, agenda akademik ke depan perlu menegaskan kebangkitan epistemologi masyarakat. Kebangkitan ini bukan nostalgia romantis, melainkan upaya emansipasi pengetahuan. Kita perlu menyadari bahwa ilmu selalu bermukim—ia lahir dari konteks geografis, sosial, dan sejarah tertentu. Tidak ada ilmu yang sepenuhnya universal tanpa jejak lokalitas⁴⁹. Dengan kesadaran ini, kita bisa memandang bahwa pengetahuan masyarakat bukanlah sekadar kearifan lokal, tetapi merupakan basis epistemik yang sah.

Selanjutnya, kita perlu mengembalikan masyarakat sebagai subjek epistemik. Artinya, masyarakat memiliki hak untuk mendefinisikan pengetahuannya sendiri dan menentukan arah penggunaan pengetahuan tersebut. Agenda riset akademik seharusnya bukan sekadar meneliti masyarakat (*research on community*), tetapi juga meneliti bersama masyarakat (*research with community*)⁵⁰. Tidak hanya itu, kita perlu mengakui adanya pluralitas epistemik. Pengetahuan tidak hanya lahir dari metode kuantitatif atau laboratorium, tetapi juga dari pengalaman hidup, refleksi spiritual, serta praktik budaya. Pluralitas ini bukan ancaman bagi ilmu pengetahuan, melainkan memperkaya cara kita memahami realitas⁵¹.

Kita harus membuka ruang bagi kosmologi dan kearifan ekologis. Bagi masyarakat adat, hutan bukan sekadar sumber kayu, tetapi ruang hidup yang dijaga dengan aturan adat. Bagi petani, musim tanam bukan sekadar hitungan teknis, tetapi bagian dari siklus kosmos yang melibatkan ritual dan doa. Dimensi ekologis dan spiritual semacam ini sering diabaikan dalam kerangka epistemologi modern. Padahal, di sanalah letak daya tahan masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian⁵².

Perlu adanya pengkajian ulang lagi atas tendensi sentralisasi epistemik yang hanya mengakui satu pusat pengetahuan global. Sebaliknya, kita perlu desentralisasi pengetahuan: mengakui bahwa pengetahuan masyarakat sah pada tempatnya, dan bahkan relevan secara global. Misalnya, praktik agroekologi komunitas lokal di Indonesia dapat memberikan jawaban atas krisis iklim yang kini dihadapi dunia⁵³. Pengakuan epistemologi masyarakat bukan hanya soal budaya, melainkan juga soal keadilan sosial global⁵⁴. Bila pengetahuan masyarakat terus terpinggirkan, maka yang hilang bukan hanya kekayaan lokal, melainkan juga potensi solusi bagi krisis global.

⁴⁹ Santos, B. de S. (2014). *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide*. Routledge.

⁵⁰ Smith, L. T. (2012). *Decolonizing Methodologies*.

⁵¹ Harding, S. (1998). *Is Science Multicultural? Postcolonialisms, Feminisms, and Epistemologies*. Indiana University Press.

⁵² Berkes, F. (2012). *Sacred Ecology*. Routledge.

⁵³ Altieri, M. A. (2009). "Agroecology, Small Farms, and Food Sovereignty." *Monthly Review*, 61(3), 102–113.

⁵⁴ Santos, B. de S. (2014). *Epistemologies of the South*.

Pemikiran tersebut membawa refleksi bahwa sebagai insan akademik, kita dipanggil untuk mengembangkan agenda riset yang berpihak pada pengakuan epistemologi masyarakat. Kita harus menggeser posisi masyarakat dari sekadar objek kebijakan menjadi mitra epistemik; dari penerima pasif menjadi produsen aktif pengetahuan. Kita perlu membangun kerangka akademik yang bersifat dialogis, kolaboratif, dan gotong royong, agar ketidakpastian global tidak serta-merta melahirkan korosi inklusi sosial, tetapi justru memperkuat daya tahan komunitas melalui pengakuan atas epistemologi mereka. Dengan demikian, agenda akademik ke depan tidak hanya berbicara tentang ketahanan ekonomi atau ketahanan politik, tetapi juga ketahanan epistemik. Sebab, hanya dengan mengakui pluralitas pengetahuan masyarakat, kita bisa membangun dunia akademik yang lebih inklusif, lebih demokratis, dan lebih relevan untuk menjawab tantangan zaman.

Agenda 2: Membersamai Masyarakat (*Facilitating*)

Agenda akademik berikutnya yang patut kita tekankan adalah ***membersamai masyarakat***. Agenda ini lahir dari kesadaran bahwa di tengah pusaran ketidakpastian global, masyarakat bukanlah sekadar kelompok rentan yang harus dilindungi, tetapi justru aktor utama yang memiliki daya tahan, kreativitas, dan kebijaksanaan lokal. Dalam berbagai krisis, dari pandemi hingga perubahan iklim, masyarakat menunjukkan bahwa mereka mampu bertahan dan beradaptasi. Di sinilah pentingnya menegaskan pendekatan pertama: *resilience*.

Resilience atau ketangguhan komunitas bukan sekadar istilah teknis, melainkan kenyataan hidup yang kita saksikan sehari-hari. Ketangguhan komunitas bukan muncul begitu saja, kondisi demikian tumbuh secara alamiah dari kekuatan yang dimiliki oleh komunitas—baik itu modal sosial, kekuatan ekonomi lokal, ketepatan informasi, dan kapasitas yang adaptif⁵⁵. Sementara itu, mengingatkan bahwa *resilience* tidak hanya soal kemampuan bertahan, tetapi juga soal kapasitas untuk bertransformasi⁵⁶. Kita melihat ini dalam praktik: ketika rantai pasok global terputus, komunitas petani menjaga ketahanan pangan dengan pola tanam lokal; lebih-lebih lagi, ketika masyarakat hidup tanpa listrik negara, potensi alam desa dikembangkan menjadi sumber cahaya rumah-rumah mereka; atau kita juga bisa melihat ketika bencana datang, solidaritas sosial menguat lebih cepat daripada intervensi birokrasi. Sayangnya, kembali lagi sering kali kapasitas ini dianggap “alami” sehingga tidak didukung secara serius oleh kebijakan. Akibatnya, masyarakat kerap diperlakukan sekadar sebagai penerima bantuan, bukan sebagai mitra sejajar dalam merancang solusi.

Ketangguhan saja tidak cukup. *Resilience* akan kehilangan maknanya bila tidak diikuti dengan pendekatan kedua; *co-creation*, yakni penciptaan bersama masa depan melalui kemitraan yang setara. Membersamai masyarakat artinya bergeser dari logika *top-down* menuju logika kolaboratif. Bukan lagi *development for the community*, melainkan *development with the community*. menyebut proses ini sebagai *collaborative governance*, sebuah model di mana aktor negara, swasta, dan komunitas bekerja bersama

⁵⁵ Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F., & Pfefferbaum, R. L. (2008). Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness. *American journal of community psychology*, 41(1), 127-150.

⁵⁶ Berkes, F., & Ross, H. (2013). Community resilience: Toward an integrated approach. *Society & natural resources*, 26(1), 5-20.

berdasarkan kepercayaan dan dialog⁵⁷. Dalam literatur kontemporer, *co-creation* dipahami sebagai praktik *value co-creation*, saat nilai tidak diciptakan secara sepihak oleh negara atau pasar, melainkan bersama-sama oleh berbagai aktor (Prahalad & Ramaswamy, 2004; Brandsen & Honingh, 2018)^{58,59}. Pada titik ini, *co-creation* menuntut kehadiran masyarakat sebagai *co-designers* dan *co-deciders* mengenai masa depan yang mereka impikan. Dengan demikian, kebersamai masyarakat berarti membuka ruang ketika mereka menjadi produsen pengetahuan, pengambil keputusan, sekaligus motor perubahan. Tanpa *co-creation*, agenda kebersamai masyarakat akan terjebak pada pola lama: partisipasi semu, bukan kolaborasi sejati.

Namun, *co-creation* ini tidak boleh berhenti pada retorika partisipasi. Ia harus diarahkan pada horizon yang lebih jauh: *sustainability* sebagai pendekatan selanjutnya. Dalam konteks ini, keberlanjutan bukan hanya berarti menjaga ekologi, tetapi juga memastikan keberlanjutan sosial dan ekonomi yang adil. Agyeman (2013) menyebut konsep ini sebagai *just sustainability*: keberlanjutan yang menekankan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan secara bersamaan⁶⁰. Kebersamai masyarakat berarti memastikan bahwa setiap proses pembangunan meninggalkan warisan positif, bukan beban baru. Bahwa generasi mendatang tetap memiliki hak yang sama atas air, udara, tanah, sekaligus atas kesempatan hidup yang bermartabat. Hasilnya, secara jangka panjang, pembangunan yang berkelanjutan tak hanya menjadi *tagline* “pemanis saja”, akan tetapi pembangunan yang dilakukan benar-benar merangkul semua pihak tanpa ada yang tertinggal ataupun ditinggalkan.

Hadirin yang berbahagia,

Maka, tiga hal ini—*resilience*, *co-creation*, dan *sustainability*—adalah satu rangkaian agenda akademik yang tidak bisa dipisahkan sebagai agenda kedua dalam kebersamai masyarakat sebagai sumbu kekuatan utama seluruh agenda-agenda pembangunan. Kita diajak untuk meneguhkan ketangguhan komunitas, memperluas ruang *co-creation*, dan mengarahkan semua itu pada keberlanjutan yang adil. Dengan cara inilah, kita benar-benar dapat kebersamai masyarakat, menjadikan ketidakpastian bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk membangun masa depan bersama yang lebih inklusif, lebih tangguh, dan lebih lestari.

Agenda 3: Menggemakan dan Memperjuangkan Suara Komunitas (*Amplifying & Advocating*).

Aksi kolektif lebih dari sekadar “bekerja bersama”. Ini adalah keberhasilan untuk mengubah kerumunan menjadi komunitas. Kami berpendapat bahwa komunitas adalah kumpulan yang berhasil mengkonstruksikan masalah individu sebagai persoalan bersama (*shared problem*) yang hilirnya adalah perubahan sistemik.

⁵⁷ Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.

⁵⁸ Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). *The future of competition: Co-creating unique value with customers*. Harvard Business Press.

⁵⁹ Brandsen, T., & Honingh, M. (2018). Definitions of co-production and co-creation. In *Co-production and co-creation* (pp. 9–17). Routledge.

⁶⁰ Agyeman, J. (2013). *Introducing Just Sustainabilities: Policy, Planning, and Practice*. Zed Books.

Namun begitu, perubahan sistemik tidak mungkin dicapai oleh satu aktor saja. Perubahan semacam ini hanya dapat dicapai melalui serangkaian tindakan yang dilakukan secara sinergis, baik bersama dengan pemerintah dan pelaku pasar.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Kami percaya bahwa kekuatan aksi kolektif terletak pada kemampuannya mengamplifikasi dampak.

Di Indonesia, demonstrasi baru-baru ini pada September 2025 menjadi ilustrasi yang cukup representatif tentang bagaimana aksi kolektif bekerja. Dipicu oleh keresahan atas lemahnya tata kelola, minimnya transparansi, serta terbatasnya representasi politik, protes-protes tersebut berhasil menyatukan mahasiswa, pekerja, kelompok masyarakat sipil, hingga warga biasa dalam satu gerakan perjuangan bersama. Mereka turun ke jalan bukan hanya untuk menolak kebijakan tertentu, tetapi juga untuk menuntut perbaikan sistem yang lebih adil dan akuntabel.

Fenomena ini menunjukkan bahwa ketika aspirasi rakyat bereaksi dengan kegelisahan kolektif, maka lahirlah energi sosial yang tidak mudah dibendung. Lebih dari sekadar tuduhan ekspresi kemarahan, gerakan tersebut mencerminkan aspirasi demokrasi substantif: sebuah demokrasi yang tidak berhenti pada prosedur elektoral, melainkan menjamin partisipasi bermakna dan distribusi keadilan sosial.

Harapannya, momentum ini dapat menjadi jalan pembuka untuk mereformasi struktur yang selama ini mereproduksi kekuasaan elite guna mengontrol akses terhadap sumber daya negara. Sebab terlalu lama, struktur tersebut beroperasi dengan logika eksklusif: melanggengkan *privilege* segelintir pihak alih-alih memberdayakan masyarakat.

Tak kalah penting, aksi kolektif mendorong lahirnya solusi yang inklusif dan inovatif melalui beragam perspektif. Ambil contoh krisis kesehatan masyarakat, yang tidak mungkin berhasil ditangani oleh satu pihak saja. Kolaborasi global untuk memerangi HIV/AIDS terus berinovasi, melibatkan pemerintah, peneliti, penyedia layanan kesehatan, hingga komunitas terdampak. Mereka bersatu memperkuat kampanye kesadaran, sekaligus mengadvokasi terobosan dalam pengobatan dan pencegahan. Upaya ini tidak hanya mengubah kebijakan dan menggeser narasi publik, tetapi juga menghasilkan capaian nyata: sejak akhir 1990-an, angka infeksi baru HIV telah turun lebih dari separuhnya.

Aksi kolektif juga memberi ruang bagi suara kelompok terpinggirkan, memastikan bahwa beban sekaligus tanggung jawab didistribusikan lebih adil. Kisah reformasi pendidikan di Punjab, India, menjadi contohnya. Dilatarbelakangi oleh wilayah dengan predikat sistem pendidikan terlemah di negara itu, empat organisasi masyarakat sipil bergabung dengan pemerintah untuk mengadvokasi perubahan sistemik. Hasilnya, lebih dari 25 inisiatif perbaikan berhasil dijalankan. Dampaknya transformatif: dari posisi terbawah dalam Survei Prestasi Nasional 2021–2022, Punjab kini meraih Collective Social Innovation Award di Forum Ekonomi Dunia. Di sini kita belajar, kekuatan amplifikasi tidak hanya meningkatkan skala inisiatif, tetapi juga menegaskan hak setiap anak atas kapabilitas kolektif.

Dalam semua kasus ini, kita belajar bahwa aksi kolektif bukan sekadar koordinasi. Ini adalah kekuatan yang mampu mengubah upaya terfragmentasi menjadi sebuah gerakan dengan suara yang lebih didengar dan pengaruh yang lebih inklusif. Pada akhirnya, aksi kolektif menunjukkan bahwa masa depan yang kita cita-citakan bergantung pada kemampuan kita untuk saling menyuarakan, saling memperjuangkan, dan bersama-sama mewujudkan visi tentang kesetaraan, dan kesejahteraan.

Agenda 4: Kampus Berdampak & Institusi Jangkar

Pada momen Dies Natalis ke-70 ini, kita diajak untuk menengok kembali perjalanan panjang Fisipol UGM. Fakultas ini tidak hanya menjadi ruang belajar formal, melainkan juga rumah bagi gagasan, laboratorium bagi eksperimen sosial, dan panggung bagi perjuangan mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih adil. Pertanyaannya, apakah cukup bagi Fisipol hanya menjadi kampus akademik yang melahirkan lulusan? Atau justru kini saatnya kita meneguhkan diri sebagai kampus yang benar-benar berdampak?

Diskursus global tentang kampus berdampak mulai menguat pada 1990-an; ketika kampus berdampak mengandung arti bahwa perguruan tinggi tidak hanya berhenti pada produksi pengetahuan, publikasi, atau akreditasi. Lebih dari itu, keberadaannya harus menembus batas dinding kampus, menyapa persoalan riil masyarakat, dan memberi kontribusi nyata bagi transformasi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, ukuran keberhasilan bukan semata angka indeks publikasi, melainkan perubahan sosial yang dirasakan masyarakat luas⁶¹.

Dalam situasi dunia yang ditandai ketidakpastian, kampus tidak boleh berdiam diri. Ilmu pengetahuan yang kita kembangkan harus berfungsi sebagai katalisator perubahan. Seperti ditegaskan Prof. Khairul Munadi, Dirjen Dikti Kemendiknas, “*Ilmu bukan disimpan di rak buku, melainkan dihidupkan dalam tindakan*”. Di sinilah Fisipol UGM ditantang untuk menegaskan dirinya sebagai aktor sosial yang mampu menghadirkan solusi dan memperkuat ketahanan masyarakat.

Oleh sebab itu, meminjam istilah Jeffrey Fisipol UGM harus menjadi *anchor institution*. Berbagai literatur menjelaskan istilah *anchor institution* sebagai institusi jangkar yang memiliki kapasitas untuk mengikat diri dengan ekosistem sosial-ekonomi di sekitarnya⁶². Lebih lanjut Jeffrey menyebut empat dimensi peran perguruan tinggi sebagai *anchor institution*, yakni: *builder* (membangun komunitas), *broker* (menjembatani relasi), *beacon* (menjadi mercusuar nilai dan pengetahuan), serta *base* (menjadi basis pemberdayaan masyarakat).

Dalam konteks *builder* (membangun komunitas), Fisipol hadir bukan hanya di ruang kuliah, melainkan juga di tengah desa, pasar, dan komunitas warga. Melalui riset terapan, program pemberdayaan UMKM, advokasi hak-hak kelompok rentan, dan

⁶¹ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, 2025; *Diktisaintek Berdampak*, Jakarta.

⁶² Jeffrey, C. (2024). Builder, broker, beacon and base: Universities as anchor institutions. *Progress in Human Geography*, 03091325251350307.

inisiatif pembangunan inklusif, kampus harus memperkuat fondasi sosial masyarakat. Tugas membangun komunitas adalah memastikan ilmu pengetahuan terwujud sebagai praktik sosial yang mencerahkan.

Di sinilah Fisipol hadir, meminjam istilah O'Farrel dkk, sebagai *just anchor institution*⁶³. Konsep *just anchor* menegaskan bahwa universitas bukan hanya institusi ekonomi yang stabil, tetapi juga memiliki misi untuk mewujudkan keadilan sosial, ekonomi, dan epistemik. Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan peran sebagai *civic university* dan *anchor institution* melalui kolaborasi lintas sektor serta ko-produksi pengetahuan bersama warga. Universitas didorong untuk menjadi lebih terlihat bagi komunitas marginal sekaligus memberi ruang bagi visibilitas mereka dalam diskursus publik.

Sebagai *broker* (menjembatani relasi), Fisipol memainkan peran strategis sebagai penghubung. Fakultas ini membuka ruang dialog antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, dan komunitas akar rumput. Peran *broker* memastikan kepentingan yang beragam dapat dipertemukan dalam semangat kolaborasi multipihak untuk menghasilkan kebijakan dan solusi publik yang lebih berpihak.

Sebagai *beacon* (menjadi mercusuar nilai dan pengetahuan), Fisipol bertugas menyalakan cahaya nilai dan inspirasi. Dari fakultas ini lahir gagasan tentang demokrasi, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Alumni, penelitian, dan pengabdian masyarakat menjadi bukti bahwa kampus bukan menara gading, melainkan mercusuar yang menerangi jalan perubahan, memberi arah, dan membangkitkan harapan .

Sebagai *base* (menjadi basis pemberdayaan masyarakat), Fisipol menjadi rumah bersama dan pusat pembelajaran sepanjang hayat. Perpustakaan, laboratorium, hingga ruang publik di kampus terbuka bagi masyarakat luas. Dengan akar kuat di Yogyakarta dan jejaring nasional, Fisipol menjadi basis kokoh untuk mengembangkan gerakan pendidikan, sosial, dan kesehatan yang berkelanjutan.

Hadirin sekalian, dunia akademik kini memasuki paradigma baru. Riset tidak cukup hanya valid secara internal, tetapi harus menghasilkan dampak eksternal yang nyata. Ozanne dkk menegaskan bahwa riset berdampak menuntut kolaborasi lintas disiplin, keterlibatan komunitas, serta ukuran keberhasilan yang melampaui *h-index*.⁶⁴ Keller menambahkan bahwa dukungan institusional dan perubahan budaya akademik

⁶³ O'Farrell, L., Hassan, S., & Hoole, C. (2022). The university as a just anchor: universities, anchor networks and participatory research. *Studies in Higher Education*, 47(12), 2405-2416.

⁶⁴ Ozanne, J. L., Davis, B., Blocker, C. P., DeBerry-Spence, B., & Gann, R. B. (2024). Transitioning to new paradigms for societally impactful research: Recommendations from the TCR impact task force and an agenda. *Journal of Public Policy & Marketing*, 43(3), 191-206.

mutlak diperlukan agar riset sosial tidak berhenti sebagai artikel jurnal, tetapi menjadi praktik yang mengubah kehidupan⁶⁵.

Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah: bagaimana mengukur dampak itu? Watermeyer mengkritik kecenderungan pengukuran berbasis bibliometrik yang gagal menangkap perubahan sosial nyata⁶⁶. Woolcott, Keast, dan Pickernell memperkenalkan konsep *deep impact*, yakni dampak yang terjadi tidak hanya dari hasil riset, melainkan juga dari proses kolaborasi penelitian itu sendiri⁶⁷. Dengan demikian, Fisipol perlu menekankan kualitas relasi sosial yang lahir dari riset, bukan hanya hasil akhirnya.

Kerangka *Community Engagement for Impact* (CEFI) yang dikembangkan Kelly & Given memberi panduan praktis: perubahan sosial akan lebih mungkin tercapai bila kampus memberikan dukungan struktural, insentif, dan ruang bagi dosen serta peneliti untuk bekerja bersama komunitas⁶⁸. Di sinilah Fisipol dapat tampil sebagai pelopor dalam menanamkan *engagement* dengan komunitas sebagai bagian integral dari dunia akademik.

Refleksi Filosofis: Memahami Masyarakat secara Transkonstruktif

Benedict Anderson, dalam karyanya yang monumental *Imagined Communities*, menjelaskan bahwa bangsa dan negara adalah konstruksi sosial yang hidup dalam bayangan kolektif warganya. Ia menegaskan bahwa kewarganegaraan adalah sebuah komunitas yang “dibayangkan”—sebuah entitas yang anggotanya tidak pernah saling berjumpa secara langsung, namun tetap dipersatukan oleh simbol, narasi, dan media komunikasi. Paradigma ini memberikan pemahaman mendalam bahwa hakikat bernegara tidak hanya bersifat administratif atau birokratis, melainkan merupakan konstruksi ideologis yang dikelola melalui simbol-simbol kebersamaan⁶⁹.

Namun, dalam konteks Indonesia, komunitas yang “dibayangkan” itu kerap menjadi beban. Kita sering didorong untuk membayangkan kewarganegaraan yang ideal: inklusif, adil, dan partisipatif. Akan tetapi, pengalaman sosial sehari-hari menunjukkan adanya jurang antara imajinasi dan realitas. Ketidaksetaraan ekonomi, ketegangan

⁶⁵ Keller, P. A. (2024). Commentary on "Transitioning to New Paradigms for Societally Impactful Research: Recommendations from the TCR Impact Task Force and an Agenda". *Journal of Public Policy & Marketing*, 43(3).

⁶⁶ Watermeyer, R. (2014). Issues in the articulation of 'impact': the responses of UK academics to 'impact' as a new measure of research assessment. *Studies in Higher Education*, 39(2), 359-377.

⁶⁷ Woolcott, G., Keast, R., & Pickernell, D. (2020). Deep impact: Re-conceptualising university research impact using human cultural accumulation theory. *Studies in higher education*, 45(6), 1197-1216.

⁶⁸ Kelly, W. B., & Given, L. M. (2024). The community engagement for impact (CEFI) framework: an evidence-based strategy to facilitate social change. *Studies in Higher Education*, 49(3), 441-459.

⁶⁹ Anderson, B. (1983). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso.

politik, dan praktik eksklusi justru membuat imajinasi kebangsaan itu terasa jauh dari pengalaman nyata warga. Maka, wajar jika muncul pertanyaan reflektif: apakah sudah saatnya kita mereka ulang gambaran baru tentang bermasyarakat di Indonesia?

Refleksi ini menuntun kita pada apa yang kami sebut sebagai **paradigma transkonstruksi**. Paradigma ini mengajak kita melampaui kerangka epistemologis yang kerap dikonstruksi oleh kanon pengetahuan dominan. Selama ini, wacana akademik cenderung terikat pada teori besar yang diwarisi dari tradisi Barat, seakan-akan itu adalah horizon pengetahuan yang tak tergantikan. Padahal, masyarakat kita memiliki pengalaman sosial yang berbeda, yang membutuhkan pembacaan epistemik tersendiri. Paradigma transkonstruksi mengajak kita membaca ulang keberadaan akademik di tengah masyarakat—bukan hanya mengulang teori lama, melainkan menyusun ulang teori yang berpijak pada pengalaman empiris warga⁷⁰.

Masyarakat tidak bisa hanya dipahami sebagai konsep abstrak atau narasi dari atas. Ia adalah proses interaktif yang lahir dari pengalaman hidup sehari-hari. Dalam perspektif transkonstruksi, masyarakat bukan hanya *imagined community* ala Anderson, tetapi juga *enacted community*: komunitas yang diwujudkan melalui interaksi nyata, perjuangan, dan aksi kolektif. Dengan kata lain, masyarakat adalah pengalaman yang dialami (*lived experience*) sekaligus diperjuangkan dalam keseharian⁷¹.

Refleksi ini beririsan dengan teori komunikasi pembangunan. Jürgen Habermas menekankan bahwa banyak masalah sosial berakar pada kegagalan komunikasi. Dalam *The Theory of Communicative Action*, ia membedakan logika komunikatif yang berlandaskan konsensus dari logika instrumental yang mengejar efisiensi. Menurut Habermas, dominasi logika instrumental membuat ruang publik kehilangan daya kritisnya. Meski demikian, kritik terhadap Habermas kerap diarahkan pada sifat “utopis” dari situasi bicara ideal yang ia bayangkan. Dalam kenyataannya, ketimpangan kuasa, ekonomi, dan akses pengetahuan hampir mustahil dihapuskan sepenuhnya⁷².

Di sinilah paradigma transkonstruksi dapat memberi sumbangan. Ia tidak bertujuan mendekonstruksi Habermas, melainkan melengkapi perspektifnya. Transkonstruksi menuntut agar kerangka komunikatif dipraksiskan secara lebih realistis: bukan menunggu terciptanya situasi bicara ideal, tetapi menciptakan ruang-ruang dialog yang meski tidak sempurna, tetap memungkinkan warga berpartisipasi. Pendekatan ini menggeser komunikasi pembangunan dari idealisme abstrak menuju praktik kolaboratif yang mengakui keterbatasan sekaligus potensi masyarakat.

Proses transkonstruksi ini tentu bersifat radikal. Dalam praktiknya, relasi antar aktor—masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, bahkan ekologi—masih berjalan sendiri-sendiri. Sering kali, relasi tersebut justru diwarnai kooptasi satu pihak terhadap pihak lain. Oleh karena itu, pembangunan transkonstruktif tidak bisa berhenti pada paradigma *top-down* atau *bottom-up* semata. Ia harus menekankan *gotong royong* epistemik, ketika setiap aktor duduk bersama untuk merumuskan arah hidup bersama yang strategis dan mendalam. Strategis artinya berorientasi pada langkah-langkah taktis

⁷⁰ Escobar, A. (1995). *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*.

⁷¹ Schutz, A. (1967). *The Phenomenology of the Social World*. Northwestern University Press.

⁷² Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action, Volume One: Reason and the Rationalization of Society*. Beacon Press.

yang saling memahami, sementara mendalam berarti menyentuh aspek-aspek holistik yang menempatkan keberlanjutan sebagai tujuan utama⁷³.

Dari titik inilah kita perlu merefleksikan kembali makna kesejahteraan. Amartya Sen melalui *capability approach* menegaskan bahwa kesejahteraan tidak semata-mata diukur dari sumber daya atau pendapatan, melainkan dari kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang ia nilai berharga. Martha Nussbaum kemudian melengkapinya dengan daftar kapabilitas dasar yang menekankan pengakuan terhadap martabat manusia⁷⁴. Dalam kerangka transkonstruksi, pendekatan kapabilitas ini mengingatkan kita bahwa pembangunan harus berpijak pada pengakuan terhadap eksistensi warga, pengalaman hidup mereka, dan perjuangan mereka dalam membangun kehidupan.

Dengan demikian, pembangunan yang berperspektif transkonstruktif bukan hanya upaya teknokratik untuk mengisi bayangan “imagined community,” tetapi gerakan reflektif untuk menjadikan masyarakat sebagai komunitas yang dijalani dan dihidupi. Inilah filsafat pembangunan yang lugu sekaligus arif: pembangunan yang mengakui masyarakat sebagai subjek, menghubungkan teori dengan pengalaman, dan menempatkan gotong royong sebagai fondasi dalam menghadapi ketidakpastian zaman.

⁷³ Santos, B. de S. (2014). *Epistemologies of the South*

⁷⁴ Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press; Nussbaum, M. (2011). *Creating Capabilities*. Harvard University Press.